

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan yang dijabarkan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan yaitu:

1. Prosentase Dewan Komisaris Independen secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris Independen yang merupakan bagian dari Komisaris Perseroan tidak melakukan fungsi pengawasan secara baik terhadap manajemen.
2. Jumlah Komite Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan Komite Audit menurunkan kegiatan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Komite audit harus menjalankan tugas dan tanggung jawab dan minimal beranggotakan 2 orang menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan minimal beranggotakan 3 orang menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

3. Kualitas Audit secara parsial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP *big four* dan KAP non *big four* terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, bila mengikuti prinsip-prinsip *good corporate governance*, independensi dan profesionalitas auditor.
4. Kepemilikan Institusional secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Kepemilikan institusional tidak mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri.
5. Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kualitas Audit dan Kepemilikan Institusional merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan *good corporate governance* yang baik dalam meminimalkan tindakan *tax avoidance*.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan tentunya terdapat beberapa keterbatasan yaitu, sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini tidak dapat mewakili seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, karena peneliti hanya menggunakan sampel dari perusahaan Properti.

2. Perusahaan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak semuanya digunakan menjadi sampel, karena peneliti menggunakan *purposive sampling* dalam pengambilan sampel. Sampel yang diambil adalah perusahaan properti yang hanya memenuhi kriteria-kriteria tertentu.
3. Periode pengamatan penelitian hanya tiga tahun, dengan jumlah sampel penelitian adalah 90 sampel, sehingga hasil penelitian ini masih kurang mampu untuk dianggap mewakili populasi yang ada.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sektor perusahaan yang beragam, misalnya yaitu sektor manufaktur, perusahaan jasa, keuangan, atau perbankan. Hal ini untuk mengetahui perbandingan dengan hasil penelitian sebelumnya.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan jumlah periode penelitian, sehingga dapat diketahui pengaruh penelitian dalam jangka panjang dan mendapatkan prediksi yang lebih tepat.
3. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak seharusnya melakukan pengawasan terhadap perusahaan *go public*, terkait tugas dan tanggung jawab komite audit dalam mengoptimalkan penerapan *good corporate governance* agar dapat meminimalkan perilaku manajemen dalam melakukan penghindaran pajak. Selain itu, perlu diperhatikan KAP (*external audit*) yang berkompeten dibidangnya serta independen dalam

melaksanakan tugas agar penghindaran pajak yang dilakukan dapat diminimalkan.

